

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI INDONESIA**

**TESIS**

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Dan** **Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Oleh:**

**Ramauli Tampubolon**

**NPM. 7222800028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

# HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILEGAL FISHING DI INDONESIA**

**Ramauli Tampubolon**

**NPM. 7222800028**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

|  |  |
| --- | --- |
| Pembimbing I,    **Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H**  NIDN. 0606066001 | Tegal, 15 Juli 2024  Pembimbing II,    **Dr. Sanusi, S.H., M.H**  NIDN. 0609086202 |
| Mengetahui,  Direktur Pascasarjana,  **Prof. Dr. Sitti Hartinah, DS., MM.**  NIDN 0017115401 | |

# PENGESAHAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing Di Indonesia” karya:

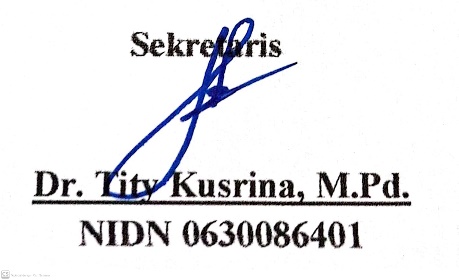
Nama : Ramauli Tampubolon

NPM : 7222800028

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian tesis Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal pada hari …………, tanggal …. …………… 2024.

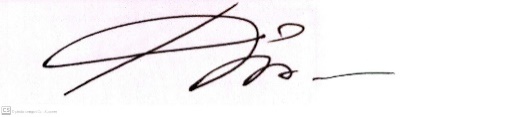
Tegal, Juli 2024

Panitia Ujian

Ketua, Sekretaris,

**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. Dr. Tity Kusrina, M.Pd.**

NIDN. 0606066001NIDN. 0630086401

Penguji Utama,

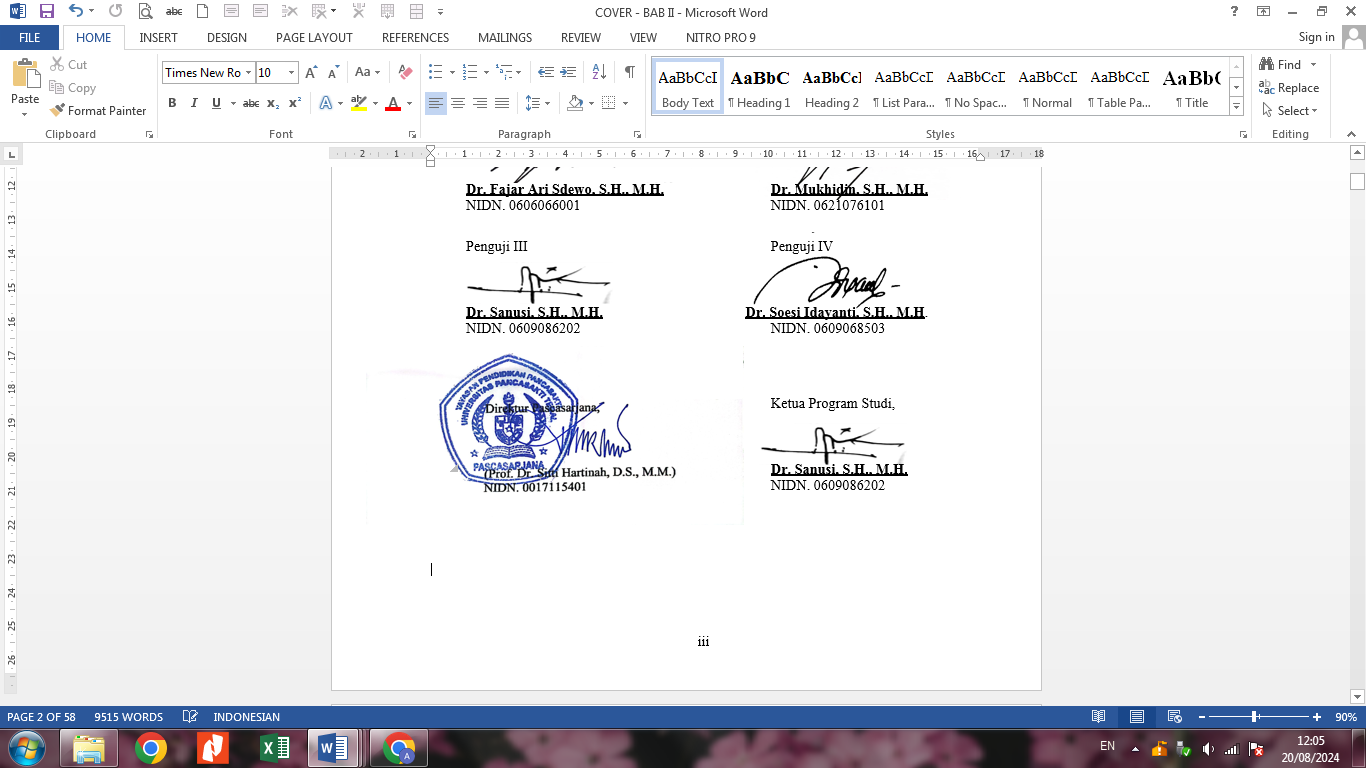
**Dr. Moh. Khamim, S.H., M.H.**

NIDN. 0617026101

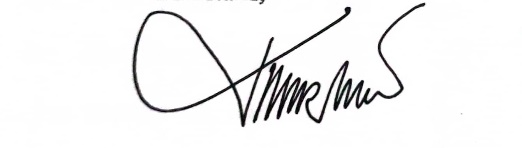
Penguji I, Penguji II,



**Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H Dr. Sanusi, S.H., M.H**

NIDN. 0606066001 NIDN. 0609086202

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana, Ketua Program Studi,

**Prof. Dr. Sitti Hartinah D.S., M.M. Dr. Sanusi, S.H., M.H.**

NIP. 19541117 198103 2 002 NIDN. 0609086202

# PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramauli Tampubolon

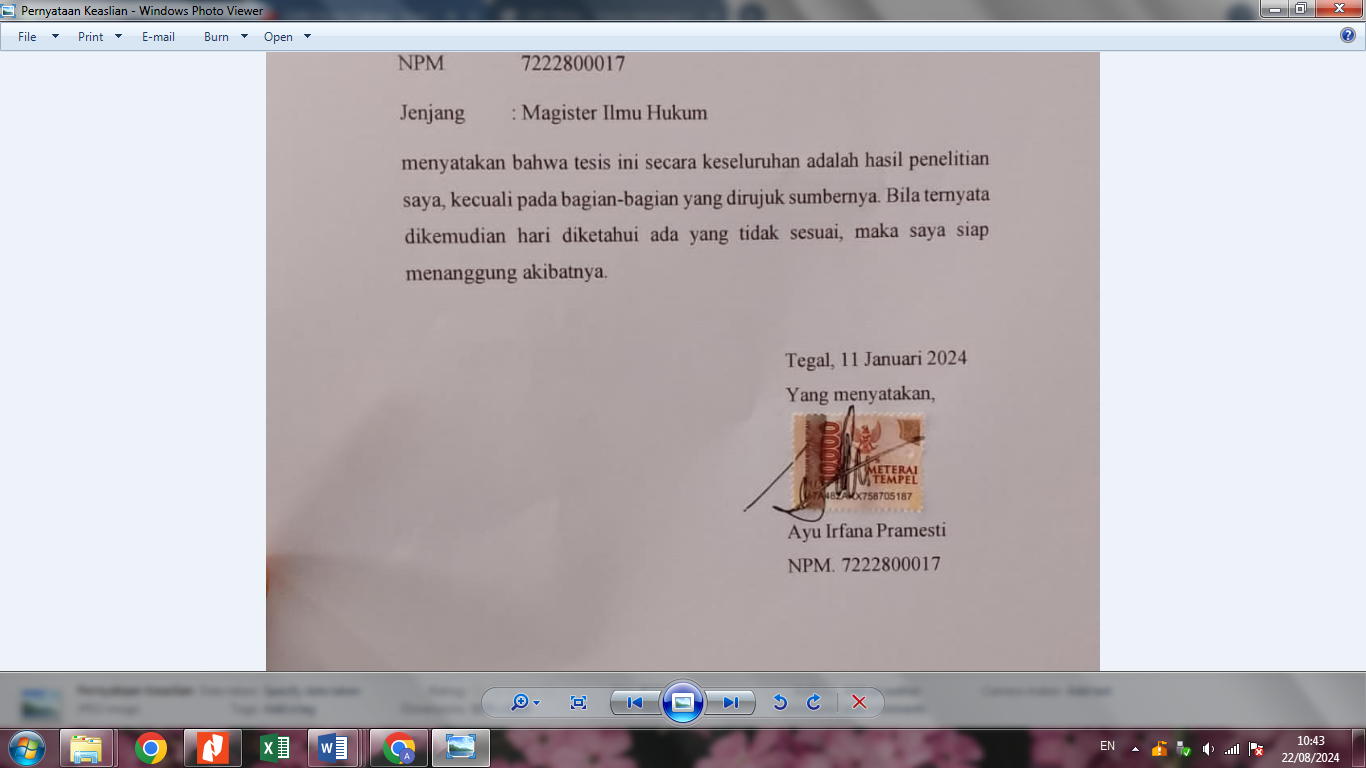
NPM : 7222800028

Jenjang : S2/ Maagister Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ditemui ada yang tidak sesuai, maka saya siap meanggung akibatnya

Tegal, 20 Juli 2024

Yang menyatakan,



**Ramauli Tampubolon**

# ABSTRAK

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menghadapi tantangan serius dalam penegakan hukum terhadap ilegal fishing. Luasnya wilayah perairan dan terbatasnya sumber daya pengawasan menjadi kendala utama. Kompleksitas hukum dan yurisdiksi internasional sering menghambat proses penindakan. Korupsi dan lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah turut mempersulit upaya pemberantasan. Akibatnya, Indonesia mengalami kerugian ekonomi besar dan ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya lautnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya problematika hukum penegakan ilegal fishing dan bagaimana upaya menangani problematika penegakan hukum ilegal fishing. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis riset kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan penelitian normatif. Sumber data penelitian menggunakan sumber data sekunder, lalu kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif dengan cara berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika penegakan hukum ilegal fishing di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, luasnya wilayah perairan Indonesia menyulitkan pengawasan efektif, diperparah dengan keterbatasan jumlah kapal patroli dan personel. Kedua, terdapat kelemahan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi data. Keterbatasan teknologi pengawasan dan sumber daya manusia juga menjadi kendala signifikan. Selain itu, sanksi hukum yang belum optimal serta faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan masyarakat pesisir, turut berkontribusi pada maraknya praktik ilegal fishing. Untuk menanggulangi problematika tersebut, beberapa langkah strategis perlu diambil. Peningkatan kapasitas pengawasan melalui penambahan armada dan penggunaan teknologi canggih menjadi prioritas utama. Penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kualitas SDM penegak hukum juga sangat diperlukan. Penyempurnaan regulasi untuk memberikan sanksi lebih berat dan mempercepat proses peradilan kasus ilegal fishing harus dilakukan. Program pemberdayaan masyarakat pesisir dan penguatan kerjasama internasional dalam pengawasan laut juga menjadi langkah penting. Terakhir, pengembangan sistem deteksi dini seperti Vessel Monitoring System dan pemanfaatan Artificial Intelligence dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik ilegal fishing di perairan Indonesia.

**Kata Kunci: Indonesia, Ilegal Fishing, Penegakan Hukum, Problematika Hukum.**

# ABSTRACT

Indonesia, as the world's largest archipelagic nation, faces serious challenges in law enforcement against illegal fishing. The vastness of the water area and limited supervision resources are the main obstacles. The complexity of international law and jurisdiction often hampers the enforcement process. Corruption and weak coordination between government agencies have also made eradication efforts difficult. As a result, Indonesia has suffered major economic losses and threats to the sustainability of its marine resources. The problem in this study is how the factors that cause the problems of illegal fishing enforcement law and how to deal with the problems of illegal fishing law enforcement. The type of research used in this study is a type of library research with a normative research approach. The research data source uses secondary data sources, then analyzed by qualitative analysis by deductive thinking. The results of the study show that the problem of illegal fishing law enforcement in Indonesia is caused by several main factors. First, the vastness of Indonesia's territorial waters makes it difficult to monitor effectively, exacerbated by the limited number of patrol boats and personnel. Second, there are weaknesses in coordination between law enforcement agencies, which results in overlapping authority and lack of data synchronization. The limitations of supervision technology and human resources are also a significant obstacle. In addition, suboptimal legal sanctions and economic and social factors, such as poverty in coastal communities, have also contributed to the rise of illegal fishing practices. To overcome these problems, several strategic steps need to be taken. Increasing supervisory capacity through the addition of fleets and the use of advanced technology is a top priority. Strengthening coordination between agencies and improving the quality of law enforcement human resources are also very necessary. Improvements in regulations to provide heavier sanctions and speed up the judicial process of illegal fishing cases must be carried out. Coastal community empowerment programs and strengthening international cooperation in marine surveillance are also important steps. Finally, the development of early detection systems such as the Vessel Monitoring System and the use of Artificial Intelligence can increase the effectiveness of law enforcement against illegal fishing practices in Indonesian waters.

**Keywords: Indonesia, Illegal Fishing, Law Enforcement, Legal Problems.**

# MOTTO

"Keadilan adalah kebaikan tertinggi dari negara, dan dasar dari semua kebaikan lainnya."

**(Plato)**

"Pada dasarnya, hukum adalah akal tanpa hasrat."

**(Aristoteles)**

**Persembahan :**

* Istriku tercinta Sih Yunika Purbawati, S.Pd. dan kedua anakku tersayang :

1. Casey Aurelia Clearesta

2. Axell Tristan Pratisara

* Sahabat-sahabatku seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam penulisan tesis ini.
* Almamater tercinta UPS Tegal.

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Dengan Tesis ini pula, penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini ucapan terima penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah menetapkan kami sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana UPS Tegal.
2. Prof. Dr. Hj. Sitti Hartinah, DS, M.M.**,** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan kebijakan dan pelayanan akademik selama studi di Pascasarjana UPS Tegal.
3. Dr. Sanusi, S.H., M.H. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal dan selaku sebagai Dosen Pembimbing 1
4. Dr. Fajar Ari Sudewo, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Tesis ini.
5. Segenap Dosen Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan Studi Strata 2. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Tuhan YME. sebagai amal shalih.

Semoga Tuhan YME membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Tuhan YME. penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya.

Tegal, Juli 2024

Penulis

# DAFTAR ISI

[HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING ii](#_Toc172893616)

[PENGESAHAN UJIAN TESIS iii](#_Toc172893617)

[PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv](#_Toc172893618)

[ABSTRAK v](#_Toc172893619)

[ABSTRACT vi](#_Toc172893620)

[MOTTO vii](#_Toc172893621)

[KATA PENGANTAR viii](#_Toc172893622)

[DAFTAR ISI 1](#_Toc172893623)

[DAFTAR TABEL 3](#_Toc172893624)

[BAB I 4](#_Toc172893625)

[PENDAHULUAN 4](#_Toc172893626)

[A. Latar Belakang 4](#_Toc172893627)

[B. Rumusan Masalah 14](#_Toc172893628)

[C. Tujuan Penelitian 14](#_Toc172893629)

[D. Manfaat Penelitian 15](#_Toc172893630)

[E. Originalitas Penelitian 15](#_Toc172893631)

[F. Kerangka Konseptual 19](#_Toc172893632)

[G. Kerangka Teori 27](#_Toc172893633)

[H. Sistematika Penulisan 34](#_Toc172893634)

[BAB II 36](#_Toc172893635)

[TINJAUAN PUSTAKA 36](#_Toc172893636)

[I. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikanan 36](#_Toc172893637)

[1. Definisi Hukum Perikanan 36](#_Toc172893638)

[2. Pengaturan Hukum Perikanan 38](#_Toc172893639)

[3. Perjanjian Internasional Pengelolaan Perikanan Dunia 40](#_Toc172893640)

[4. Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Sumberdaya Perikanan di Indonesia 42](#_Toc172893641)

[B. Tinjauan Umum Tentang *Ilegal Fishing* 47](#_Toc172893642)

[1. Definisi Ilegal Fishing 47](#_Toc172893643)

[2. Pengaturan Mengenai *Ilegal Fishing* 50](#_Toc172893644)

[3. Rumusan Tindak Pidana *Ilegal Fishing* 52](#_Toc172893645)

[4. Kasus Hukum Ilegal Fishing 55](#_Toc172893646)

[C. Tinjauan Umum Tentang Penegekan Hukum 58](#_Toc172893647)

[1. Definisi Penegakan Hukum 58](#_Toc172893648)

[2. Penegakan Tindak Pidana Di Indonesia 60](#_Toc172893649)

[3. Jenis Jenis Penegakan Hukum 62](#_Toc172893650)

[4. Lembaga Penegak Hukum Perikanan 64](#_Toc172893651)

[D. Tinjauan Umum Tentang Problematika Hukum Perikanan 66](#_Toc172893652)

[BAB III 69](#_Toc172893653)

[METODE PENELITIAN 69](#_Toc172893654)

[A. Jenis Penelitian 69](#_Toc172893655)

[B. Pendekatan Penelitian 69](#_Toc172893656)

[C. Sumber Data 71](#_Toc172893657)

[D. Teknik Pengumpulan Data 73](#_Toc172893658)

[E. Teknik Analisis Data 73](#_Toc172893659)

[BAB IV 75](#_Toc172893660)

[HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 75](#_Toc172893661)

[A. Faktor Penyebab Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia 75](#_Toc172893662)

[B. Upaya Untuk Mengatasi Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* Di Indonesia 104](#_Toc172893663)

[BAB V 151](#_Toc172893664)

[PENUTUP 151](#_Toc172893665)

[A. Simpulan 151](#_Toc172893666)

[B. Saran 152](#_Toc172893667)

[DAFTAR PUSTAKA 154](#_Toc172893668)

[LAMPIRAN - LAMPIRAN 158](#_Toc172893669)

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negara …………………………………………. 10

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Kekayaan sumber daya hayati laut Indonesia melimpah, dengan lebih dari 8.500 spesies ikan dan biota laut lainnya yang tersebar di perairan Indonesia. Potensi perikanan ini menjanjikan sumber daya ekonomi yang besar bagi bangsa Indonesia. Salah satu potensi perikanan terbesar Indonesia adalah perikanan tangkap di laut lepas. Indonesia memiliki Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang sangat luas, meliputi sebagian besar perairan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan kekayaan ikan seperti tuna, cakalang, dan ikan demersal, potensi perikanan tangkap Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 6,5 juta ton per tahun. (Ikbal, 2021)

Selain perikanan tangkap, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam budidaya perikanan atau akuakultur. Dengan kondisi geografis yang mendukung, Indonesia memiliki lahan yang sangat cocok untuk budidaya ikan air tawar, air payau, dan air laut. Komoditas unggulan akuakultur Indonesia meliputi udang, ikan mas, ikan nila, dan rumput laut, yang memiliki permintaan tinggi di pasar domestik dan global. Potensi perikanan Indonesia juga terletak pada keanekaragaman hayati terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Terumbu karang Indonesia merupakan salah satu yang terkaya di dunia, dengan sekitar 590 spesies karang keras dan lebih dari 1.000 spesies ikan karang. Kekayaan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang sangat diminati, serta menjanjikan potensi ekonomi dari sektor ekowisata bahari. (Radiarta, 2016)

Meskipun memiliki potensi perikanan yang besar, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sumber daya ini. Penangkapan ikan yang berlebihan, kerusakan lingkungan laut, dan kurangnya pengelolaan yang berkelanjutan dapat mengancam keberlanjutan potensi perikanan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya laut, meningkatkan produktivitas perikanan, serta mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan demikian, potensi perikanan Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, masalah *illegal fishing* telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya kelautan Indonesia. Tindakan *ilegal* tersebut tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan nasional. (Ramadhan, 2024)

Kekayaan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 92.000 kilometer, memiliki kekayaan sumber daya kelautan yang melimpah. Namun, kekayaan ini terancam oleh praktik *illegal fishing* yang terus berlangsung. *Illegal fishing*, atau penangkapan ikan secara ilegal, telah menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya kelautan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Praktik illegal fishing di perairan Indonesia meliputi berbagai kegiatan, seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan, penangkapan ikan yang dilindungi atau terancam punah, serta operasi kapal asing tanpa perizinan yang sah. Kegiatan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keseimbangan ekosistem laut dan keberlanjutan perikanan nasional. (Nurhayati, 2024)

Salah satu dampak nyata dari *illegal fishing* adalah berkurangnya stok ikan di perairan Indonesia. Eksploitasi berlebihan dan praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan telah mengakibatkan penurunan populasi ikan secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan nelayan lokal dan mengancam keamanan pangan nasional. Selain itu, *illegal fishing* juga berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem laut, seperti terumbu karang dan hutan bakau. Penggunaan alat tangkap yang merusak, seperti bom ikan dan racun, dapat menghancurkan habitat laut yang penting bagi kehidupan biota laut. Hal ini mengancam keanekaragaman hayati laut dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Ancaman *illegal fishing* tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan dan ekonomi, tetapi juga melibatkan isu keamanan maritim. Aktivitas *illegal fishing* seringkali terkait dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan perompakan. Kehadiran kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia juga dapat memicu konflik dan mengancam kedaulatan negara. (Siombo, 2013)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia telah menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Luasnya wilayah perairan Indonesia, terbatasnya sumber daya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antara instansi terkait menjadi faktor utama yang mempersulit upaya penegakan hukum. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Salah satu masalah utama dalam penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia adalah kurangnya pengawasan di wilayah perairan yang luas. Minimnya jumlah kapal pengawas dan terbatasnya teknologi pemantauan membuat banyak wilayah perairan tidak terjangkau secara efektif. Hal ini memberikan celah bagi para pelaku *illegal fishing* untuk memanfaatkan kelemahan tersebut. (Yunitasari, 2020)

Selain itu, kurangnya koordinasi antara instansi terkait juga menjadi kendala dalam penegakan hukum *illegal fishing*. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan kurangnya sinkronisasi data antara lembaga penegak hukum, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, dan Polisi Air. Kondisi ini menciptakan celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku illegal fishing untuk menghindari jeratan hukum. Faktor lain yang turut memperburuk situasi adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Banyak nelayan lokal yang terlibat dalam praktik *illegal fishing* karena ketidaktahuan atau alasan ekonomi jangka pendek. Rendahnya pendidikan dan kurangnya sosialisasi mengenai dampak negatif *illegal fishing* menjadi penyebab utama masalah ini. (Mahdin, 2022)

Salah satu tantangan besar dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan Indonesia adalah praktik *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asing. Aksi ini seringkali melibatkan kapal-kapal ikan berukuran besar yang berasal dari negara-negara tetangga maupun negara lain yang berlayar secara ilegal di perairan Indonesia untuk menangkap ikan secara besar-besaran. Modus operandi yang kerap dilakukan oleh nelayan asing dalam melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia antara lain penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, serta penangkapan jenis ikan yang dilindungi atau terancam punah. Tindakan ini tidak hanya mengancam stok ikan, tetapi juga membahayakan keanekaragaman hayati laut dan keseimbangan ekosistem. (Darmawijaya, 2022)

Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam menghadapi *illegal fishing* oleh nelayan asing adalah luasnya wilayah perairan Indonesia yang sulit diawasi secara maksimal. Minimnya jumlah kapal pengawas dan terbatasnya teknologi pemantauan membuat banyak wilayah perairan rentan terhadap aksi pencurian ikan oleh kapal-kapal asing ini. Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan penerapan sanksi yang kurang tegas terhadap pelaku *illegal fishing* juga menjadi faktor pendorong yang membuat nelayan asing berani melakukan aksinya di perairan Indonesia. Seringkali, hukuman yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera, sehingga tidak mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindak pidana tersebut di masa mendatang. Kehadiran kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia tidak hanya merugikan secara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga mengancam kedaulatan negara. Aktivitas ini seringkali terkait dengan kejahatan lintas negara lainnya, seperti penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, dan perompakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait untuk mengatasi masalah illegal fishing oleh nelayan asing di perairan Indonesia. (Mariane, 2020)

Meskipun praktik *illegal fishing* seringkali dikaitkan dengan aktivitas kapal asing di perairan Indonesia, sayangnya, nelayan lokal Indonesia juga terlibat dalam kegiatan ini. Terdapat berbagai faktor yang mendorong nelayan lokal untuk melakukan *illegal fishing,* mulai dari faktor ekonomi hingga kurangnya pemahaman tentang peraturan dan dampak negatif dari tindakan tersebut. Salah satu bentuk *illegal fishing* yang umum dilakukan oleh nelayan lokal adalah penggunaan alat tangkap yang dilarang atau merusak lingkungan, seperti bom ikan, racun, dan pukat harimau. Praktik ini sangat merugikan karena dapat menghancurkan habitat laut dan membahayakan keanekaragaman hayati. Meskipun dilarang, beberapa nelayan masih menggunakan metode ini karena dianggap lebih mudah dan efisien dalam menangkap ikan dalam jumlah besar. Selain itu, beberapa nelayan lokal juga terlibat dalam penangkapan ikan di kawasan yang dilarang atau dilindungi, seperti kawasan konservasi laut atau tempat pemijahan ikan. Tindakan ini dapat mengancam kelestarian sumber daya ikan dan merusak ekosistem laut yang penting. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kawasan konservasi dan kurangnya pengawasan di wilayah tersebut menjadi faktor pendorong praktik *illegal fishing* ini. (Naim, 2010)

Faktor ekonomi juga menjadi pendorong utama nelayan lokal untuk melakukan illegal fishing. Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan tekanan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang besar seringkali membuat mereka mengabaikan peraturan dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kurangnya alternatif sumber penghasilan lain dan minimnya akses ke sumber daya produktif juga berkontribusi pada masalah ini. Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perikanan juga menjadi faktor penting yang mendorong nelayan lokal melakukan illegal fishing. Banyak nelayan yang tidak memahami sepenuhnya dampak negatif dari tindakan mereka terhadap kelestarian sumber daya laut dan ekosistem. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan dan edukasi yang lebih intensif kepada nelayan lokal agar mereka dapat memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan mematuhi peraturan yang berlaku. (Satria, 2009)

Penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal fishing dapat tercermin dari putusan pengadilan sebagai berikut:

Tabel 1. Putusan Pengadilan Negara

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nomor Putusan** | **Isi Putusan** |
| 1 | Putusan PN Labuan Bajo Nomor 34/PID.SUS/2011/PN LBJ. Tanggal 9 Agustus 2011 | Mengadili:   1. terdakwa i. terdakwa i. imran ibu, terdakwa ii. hamdon, terdakwa iii. muhamad yunus, terdakwa iv. hermansyah, terdakwa v. adhar abdullah, terdakwa vi. muslim, terdakwa vii. nurdin alias nurdin, terdakwa viii. ismail, terdakwa ix. dirman, terdakwa x. mahfud usman, terdakwa xi. safarudin, terdakwa xii. amirudin, terdakwa xiii. basrin, terdakwa xiv. usman abdullah, terdakwa xv. h. junaidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “bersama-sama melakukan penangkapan di wilayah perikanan Republik Indonesia dengan mempergunakan bahan peledak yang membahayakan sumber daya ikan dan lingkungan secara berlanjut” ; 2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing–masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; |
| 2 | Putusan PN Labuan Bajo Nomor 10/Pid.Sus/2015/PN.LBJ Tanggal 9 Maret 2015 | MENGADILI:   1. Menyatakan Terdakwa BAHRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI? sebagaimana dalam dakwaan kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. |
| 3 | Putusan PN MAUMERE Nomor 6/Pid.Sus/2015/PN.MMR Tanggal 5 Februari 2015 | Mengadili   1. Menyatakan Terdakwa awaludin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, serta denda sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan |

Kelemahan dalam penegakan hukum illegal fishing juga dapat dilihat dari lemahnya sanksi yang dijatuhkan kepada para pelaku. Seringkali, hukuman yang diberikan tidak cukup memberikan efek jera, sehingga tidak mengurangi kecenderungan untuk melakukan tindak pidana tersebut di masa mendatang. Selain itu, minimnya upaya pencegahan dan penindakan terhadap sindikat illegal fishing yang lebih besar juga menjadi masalah yang perlu ditangani. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengatasi problematika penegakan hukum pada tindak pidana illegal fishing di Indonesia. (Pambudi, 2021)

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia?

## Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya problematika penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di Indonesia.
2. Merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika penegakan hukum tindak pidana illegal fishing di Indonesia.

## Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis. Manfaat dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan.
2. Manfaat Praktis
3. Bagi Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia.
4. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan mendukung upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing*.
5. Bagi Akademisi: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan kajian lebih lanjut bagi para akademisi dan peneliti yang tertarik pada isu penegakan hukum di sektor kelautan dan perikana.

## Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Pembahasan ini akan diketahui sisi-sisi yang membedakan dan diketahui pula letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini membahas “Problematika Penegakan Hukum *Ilegal Fishing* di Indonesia”. Adapun beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Tabel 1. Originalitas Penelitian

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nama Peneliti, Tahun Penelitian, Judul Penelitian** | **Hasil Penelitian** | **Originalitas Penelitian** |
| 1 | Simela Victor Muhammad, 2012, Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan | Penelitian ini fokus untuk mengaji penangananan *illegal fishing* lintas negara dikawasan Asia Pasifik. Hasil penelitian ini menunjukan diperlakan Kerjasama Internasional secara bilateral untuk menangani *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia | Penelitian ini fokus untuk mencari tau factor penyebab terjadinya problematika hukum penegakan *illegal fishing* dan bagaimana cara mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia |
| 2 | Inggrit Fernandes, 2017, Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan | Penelitian ini fokus untuk mengkaji tentang Sanksi terhadap illegal fishing sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana terdapat dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Selain sanksi Upaya penanganan *ilegal fishing* adalah membebankan tugas kepada pemerintah untuk merehabilitasi dampak lingkungan yang ditumbulkan akibat aktifitas *ilegal fishing.* | Penelitian ini fokus untuk mencari tau faktor yuridis dan sosiologis penyebab terjadinya problematika hukum penegakan *illegal fishing* dan bagaimana cara hukum dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia |
| 3 | Ayu Efritadewi, 2017, Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional | Penelitian ini fokus untuk Dampak dari penenggelaman kapal nelayan asing ini menimbulkan dampak yang positif dan juga menimbulkan dampak yang negatif. Dampak positif yang diperoleh dari kebijakan ini adalah pemerintah Indonesia dapat menghentikan aktivitas pencurian ikan serta menyelamatkan habitat perairan di dalam laut dari bahaya Bom nelayan asing. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dari kebijakan ini adalah ditimbulkannya polusi hasil peledakan dan pembakaran kapal asing yang dapat mencemari udara disekitar laut. | Penelitian ini fokus untuk mencari tau factor yuridis dan sosiologis penyebab terjadinya problematika hukum penegakan *illegal fishing* dan bagaimana cara hukum dalam mengatasi *illegal fishing* di wilayah perairan di Indonesia |

Dari beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena peneliti pada umumnya membahas tentang pengaturan terkait penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia.Sedangkan penelitian ini, penulisakan fokus menganalisa terkait efektifitas hukum penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia.

## Kerangka Konseptual

Hukum merupakan seperangkat aturan dan norma yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Namun, dalam penerapannya, hukum seringkali menghadapi berbagai problematika atau permasalahan yang dapat menghambat tercapainya tujuan tersebut. **Problematika hukum** dapat muncul dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, yang mempengaruhi efektivitas dan penegakan hukum. Salah satu problematika hukum yang sering dihadapi adalah ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang multitafsir atau tumpang tindih dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam penerapannya. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap hukum juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya penegakan hukum. (Sutiyoso, 2011)

Problematika hukum juga dapat muncul dari sisi penegak hukum itu sendiri. Kurangnya integritas, profesionalisme, dan kompetensi dari aparat penegak hukum dapat menghambat upaya penegakan hukum yang efektif. Praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang masih menjadi masalah yang kerap terjadi dalam lingkup penegakan hukum. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana pendukung juga dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas penunjang dapat menghambat kinerja lembaga penegak hukum dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Problematika hukum juga dapat timbul dari faktor budaya dan sosial masyarakat. Adanya nilai-nilai atau tradisi yang bertentangan dengan hukum positif dapat menimbulkan resistensi atau penolakan terhadap penegakan hukum. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. (Rahardjo, 2010)

**Penegakan hukum** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggung jawab aparat hukum semata. (Rahardjo, 2010)

Istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana saja atau hanya di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun *rechshandhaving*. Berbeda dengan istilah Inggris *law enforcement* yang diberi makna yang represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi dan petunjuk disebut *law compliance* yang berarti pemenuhan atau penataan hukum. Lebih tepat lagi jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendali hukum. (Arief, 2018)

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terkadang dalam penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Selain dari itu maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. (Arief, 2018)

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security.* Dalam perspektif akademik, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyerasikan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap mengejewantah dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. (Arief, 2018)

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. (Arief, 2018)

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘*law enforcement*’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan ‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah ‘penegakan peraturan’ dalam arti sempit. (Rahardjo, 2010)

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum (Ariyanti, 2019). Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

*Illegal fishing*, atau yang sering disebut pencurian ikan, merujuk pada segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dapat mencakup penangkapan ikan tanpa izin yang sah, penggunaan alat tangkap yang dilarang atau merusak lingkungan, penangkapan ikan dalam wilayah yang dilarang atau dilindungi, serta penangkapan jenis ikan yang terancam punah atau dilindungi.

Definisi *illegal fishing* secara lebih rinci dijelaskan dalam Rencana Aksi Internasional untuk Mencegah, Menanggulangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur *(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* atau IPOA-IUU). Menurut IPOA-IUU, *illegal fishing* mencakup kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal ikan nasional atau kapal ikan asing di perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara, tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Illegal fishing* tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan keseimbangan ekosistem laut. Praktik ini dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan penurunan stok ikan, kerusakan habitat laut seperti terumbu karang, serta ancaman bagi keanekaragaman hayati laut. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* menjadi sangat penting untuk menjamin keberlanjutan sektor perikanan dan menjaga kelestarian lingkungan laut.

Indonesia, sebagai negara maritim dengan wilayah perairan yang luas, memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai praktik *illegal fishing*. Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya kelautan dan menjamin keberlanjutan sektor perikanan nasional. Peraturan-peraturan tersebut mencakup larangan, perizinan, serta sanksi bagi pelaku *illegal fishing*, baik dari kalangan nelayan lokal maupun asing. Salah satu peraturan utama yang mengatur mengenai *illegal fishing* di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Dalam undang-undang ini, *illegal fishing* didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara melawan hukum, tidak dilaporkan, atau tidak diatur oleh peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur mengenai jenis-jenis kegiatan yang dikategorikan sebagai *illegal fishing*, seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, dan penangkapan ikan yang dilindungi.

Selain undang-undang tersebut, terdapat pula peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut mengenai aspek-aspek teknis dalam pengelolaan dan pengawasan perikanan. Misalnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan ini secara spesifik melarang penggunaan alat tangkap tertentu yang dianggap dapat merusak lingkungan dan sumber daya ikan.

Dalam rangka menegakkan peraturan-peraturan tersebut, pemerintah Indonesia juga telah membentuk badan-badan pengawas khusus, seperti Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan-badan ini bertugas untuk melakukan patroli dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia, serta menindak setiap kegiatan illegal fishing yang ditemukan. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap illegal fishing di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah perairan, terbatasnya sumber daya pengawasan, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk memperkuat pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia, termasuk melalui kerja sama internasional dan peningkatan kesadaran Masyarakat

## Kerangka Teori

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Suatu teori akan memperoleh arti yang penting apabila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan dan meramalkan gejala yang ada. Teori hukum adalah teori umum tentang hukum positif yang menggunakan metode pemahaman yuristik yang khas karena secara murni. Teori dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan-hubungan yang diamati dalam suatu penelitian. **Teori hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum**.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Solikin, 2019). Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasanganan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan masyarakat hukum menjadi kenyataan. yang disebut keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai. Berbagai catatan tentang penegakan hukum pidana banyak diberitakan oleh media massa baik cetak maupun elektronik. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan dan intensitas pemberitaan kasus-kasus tindak pidana yang berarti masyarakat merasa perlu diperhatikan keamanan, ketertiban, dan keadilannya. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

* 1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), Hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiable terhadap tidakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
  2. Manfaat (*zweckmassigkeit*), Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakan timbul keresahan di dalam masyarakat.
  3. Keadilan (*gerechtigkeit*). Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum: siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda- bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan dan tidak menyamaratakan. siapa yang mencuri.

Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

* + 1. Faktor Hukum, Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman Masyarakat Hukum mempunyai jangkauan universal karena dengan hukum bisa menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu. Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya undang-undang tersebut ke masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap, yaitu:
  1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat. Menunjukan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma- normanya.
  2. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
  3. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

1. Faktor Masyarakat, Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang ke dua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya.Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.
2. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan. Sekalipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas, Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Apabila hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar- pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat mengendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.
4. Faktor Penegak hukum, Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil. Diantaranya yaitu pejabat kepolisian, jaksa, dan hakim

.

## Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman atas penelitian tesis ini, pembahasan materi selanjutnya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab memiliki sub bab yang akan memperinci pokok-pokok bahasan di dalam masing-masing bab yang dimaksud secara substansial

**BAB I** **PENDAHULUAN**. Bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, teori hukum, tinjauan konseptual, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL**. Bab ini berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana *ilegal fishing*, tinjauan umum tentang pengelolaan sumber daya air, dan tinjauan umum tentang perjanjian internasional kerjasama penanganan *ilegal fishing* yang dibuat pemerintah Indonesia.

**BAB III METODE PENELITIAN**. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor penyebab terjadinya *ilegal fishing* dan penegakan hukum terhadap tindak pidana *ilegal fishing*.

**BAB V PENUTUP.** Penutup merupakan bagian terakhir dan memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya serta berisikan saran-saran dari permasalahan tersebu

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikanan

### Definisi Hukum Perikanan

Hukum perikanan dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan kegiatan perikanan. Ini mencakup penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi ekosistem laut sambil memastikan pemanfaatan yang optimal bagi kepentingan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks yang lebih luas, hukum perikanan merupakan bagian dari hukum lingkungan dan hukum laut internasional. Ia mengatur hak dan kewajiban negara dalam mengelola sumber daya perikanan di wilayah perairannya, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta di perairan internasional. Hukum ini juga mengatur interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dalam industri perikanan. Salah satu aspek penting dari hukum perikanan adalah pengaturan tentang metode penangkapan ikan. Ini meliputi jenis alat tangkap yang diizinkan, ukuran mata jaring, musim penangkapan, dan daerah yang boleh dieksploitasi. Tujuannya adalah untuk mencegah overfishing dan melindungi spesies yang terancam punah.

Hukum perikanan juga mengatur tentang perizinan dan kuota penangkapan ikan. Hal ini penting untuk mengontrol jumlah armada penangkapan ikan dan volume tangkapan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya perikanan. Aspek lain yang diatur dalam hukum perikanan adalah standar keamanan dan kualitas produk perikanan. Ini mencakup regulasi tentang penanganan, pengolahan, dan penyimpanan hasil perikanan untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen. Hukum perikanan juga membahas isu-isu terkait budidaya perikanan atau akuakultur. Ini meliputi regulasi tentang lokasi, jenis spesies yang dibudidayakan, penggunaan pakan dan obat-obatan, serta pengelolaan limbah untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Penegakan hukum merupakan komponen krusial dalam hukum perikanan. Ini meliputi mekanisme pengawasan, inspeksi kapal, dan sanksi bagi pelanggar. Hukum perikanan juga mengatur tentang kerjasama internasional dalam memerangi *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *fishing*. Aspek sosial ekonomi juga menjadi perhatian dalam hukum perikanan. Ini mencakup perlindungan hak-hak nelayan tradisional, pengaturan tentang tenaga kerja di sektor perikanan, serta pembagian manfaat dari eksploitasi sumber daya perikanan. Hukum perikanan juga berkaitan erat dengan konservasi keanekaragaman hayati laut. Ia mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi laut, perlindungan spesies langka, serta upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak. Dalam perkembangannya, hukum perikanan terus beradaptasi dengan tantangan baru seperti perubahan iklim dan polusi laut. Ini melibatkan pengembangan regulasi untuk mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada sektor perikanan, serta upaya mengurangi pencemaran laut dari aktivitas perikanan.

### Pengaturan Hukum Perikanan

Pengaturan hukum perikanan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia. Ia mengatur berbagai aspek mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran hasil perikanan. Salah satu aspek penting dalam pengaturan hukum perikanan di Indonesia adalah sistem perizinan. Setiap kegiatan usaha perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, wajib memiliki izin dari pemerintah. Izin ini mencakup Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Sistem perizinan ini bertujuan untuk mengontrol dan memantau aktivitas perikanan di perairan Indonesia.

Hukum perikanan Indonesia juga mengatur tentang wilayah pengelolaan perikanan. Indonesia membagi wilayah pengelolaan perikanannya menjadi 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Setiap WPP memiliki karakteristik dan potensi perikanan yang berbeda, sehingga pengelolaannya pun disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah. Aspek konservasi mendapat perhatian khusus dalam hukum perikanan Indonesia. Undang-undang mengatur tentang perlindungan spesies ikan tertentu, pembatasan alat tangkap yang merusak lingkungan, serta pembentukan kawasan konservasi perairan. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan melindungi keanekaragaman hayati laut.

Pengaturan tentang kapal penangkap ikan juga diatur secara rinci dalam hukum perikanan Indonesia. Ini mencakup standar kelayakan kapal, persyaratan *crew*, serta kewajiban penggunaan *Vessel Monitoring System* (VMS) untuk kapal-kapal berukuran tertentu. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan memudahkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan. Hukum perikanan Indonesia juga mengatur tentang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Ini meliputi standar mutu, keamanan pangan, serta sistem ketertelusuran produk perikanan. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk perikanan Indonesia di pasar internasional. Penegakan hukum menjadi komponen penting dalam pengaturan perikanan di Indonesia. Undang-undang mengatur tentang sanksi bagi pelanggar, mulai dari denda hingga pidana penjara. Selain itu, dibentuk pula pengadilan perikanan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran di bidang perikanan.

Pengaturan tentang nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil juga mendapat perhatian khusus. Hukum perikanan Indonesia memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan kecil, termasuk pembebasan dari kewajiban memiliki izin usaha perikanan untuk kapal berukuran tertentu.

Aspek kerjasama internasional juga diatur dalam hukum perikanan Indonesia. Ini mencakup kewenangan pemerintah untuk melakukan perjanjian internasional di bidang perikanan, serta upaya pemberantasan *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) fishing melalui kerjasama bilateral dan multilateral. Dalam perkembangannya, hukum perikanan Indonesia terus mengalami pembaruan untuk menghadapi tantangan baru. Ini termasuk pengaturan tentang mitigasi dampak perubahan iklim terhadap sektor perikanan, pengelolaan perikanan berbasis ekosistem, serta pemanfaatan teknologi dalam pengawasan dan pengelolaan perikanan.

### Perjanjian Internasional Pengelolaan Perikanan Dunia

Perjanjian internasional pengelolaan perikanan merupakan upaya bersama negara-negara di dunia untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan global. Perjanjian-perjanjian ini bertujuan untuk mengatur praktik penangkapan ikan, melindungi ekosistem laut, dan memastikan distribusi sumber daya perikanan yang adil antar negara. Salah satu perjanjian penting dalam hal ini adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) yang diadopsi pada tahun 1982. UNCLOS menetapkan kerangka hukum untuk semua aktivitas di lautan dan memberikan hak serta tanggung jawab kepada negara-negara dalam pengelolaan sumber daya laut, termasuk perikanan.

Perjanjian lain yang signifikan adalah *UN Fish Stocks Agreement* yang diadopsi pada tahun 1995. Perjanjian ini berfokus pada konservasi dan pengelolaan stok ikan yang bermigrasi jauh dan stok ikan yang berada di wilayah laut lebih dari satu negara. Tujuannya adalah untuk memastikan pemanfaatan jangka panjang yang berkelanjutan dari sumber daya perikanan ini. *Food and Agriculture Organization* (FAO) juga memiliki peran penting dalam pengelolaan perikanan global. FAO telah mengembangkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* pada tahun 1995, yang meskipun bersifat sukarela, telah menjadi panduan penting bagi praktik perikanan yang bertanggung jawab di seluruh dunia.

*Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) juga merupakan bagian integral dari pengelolaan perikanan internasional. RFMOs adalah badan-badan internasional yang dibentuk oleh negara-negara dengan kepentingan penangkapan ikan di wilayah tertentu. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur penangkapan ikan di laut lepas dan spesies ikan yang bermigrasi jauh. Perjanjian tentang Tindakan Negara Pelabuhan (*Port State Measures Agreement*) yang diadopsi pada tahun 2009 merupakan instrumen penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU Fishing). Perjanjian ini memberikan standar minimum untuk pemeriksaan kapal ikan asing di pelabuhan, mencegah ikan hasil tangkapan ilegal memasuki pasar internasional. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) juga memiliki dampak signifikan pada pengelolaan perikanan internasional. Meskipun tidak secara khusus ditujukan untuk perikanan, CITES mengatur perdagangan internasional spesies terancam punah, termasuk beberapa jenis ikan seperti hiu dan belut.

Perjanjian internasional juga mencakup upaya untuk melindungi ekosistem laut yang lebih luas. *Convention on Biological Diversity* (CBD) misalnya, memiliki program kerja tentang keanekaragaman hayati laut dan pesisir yang mendorong pembentukan kawasan lindung laut dan pengelolaan ekosistem berbasis pendekatan terpadu. Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian juga diberikan pada dampak perubahan iklim terhadap perikanan. *Paris Agreement*, meskipun tidak secara khusus tentang perikanan, memiliki implikasi penting bagi sektor ini karena perubahan iklim mempengaruhi distribusi dan kelimpahan stok ikan. Terakhir, saat ini sedang berlangsung negosiasi untuk perjanjian baru di bawah UNCLOS mengenai konservasi dan penggunaan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional (BBNJ). Perjanjian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam tata kelola laut internasional dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi ekosistem laut di laut lepas.

### Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Sumberdaya Perikanan di Indonesia

Pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia merupakan tantangan besar mengingat negara ini adalah archipelago terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua. Indonesia memiliki kekayaan laut yang luar biasa, dengan berbagai jenis ikan dan ekosistem laut yang beragam. Pengelolaan yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ini.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan perikanan di Indonesia. KKP mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta peraturan yang bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, dan melindungi ekosistem laut. Salah satu pendekatan utama dalam pengelolaan perikanan di Indonesia adalah Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Indonesia membagi perairannya menjadi 11 WPP, masing-masing dengan karakteristik dan tantangan pengelolaan yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus dan sesuai dengan kondisi lokal.

Indonesia juga telah menerapkan sistem kuota penangkapan ikan untuk beberapa spesies penting secara ekonomi, seperti tuna. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penangkapan berlebihan dan memastikan keberlanjutan stok ikan. Namun, penegakan dan pemantauan yang efektif masih menjadi tantangan besar. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) *Fishing*. Langkah-langkah yang diambil termasuk penenggelaman kapal asing ilegal, penguatan pengawasan laut, dan peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum perikanan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan kecil juga menjadi fokus dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. Program-program seperti asuransi nelayan, bantuan alat tangkap, dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sambil mendorong praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan. Indonesia juga menerapkan kebijakan konservasi laut melalui pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP ini bertujuan untuk melindungi habitat penting, memulihkan stok ikan, dan mendukung mata pencaharian masyarakat lokal melalui pemanfaatan berkelanjutan.

Pengembangan akuakultur menjadi strategi penting dalam pengelolaan perikanan Indonesia. Dengan meningkatkan produksi ikan budidaya, diharapkan dapat mengurangi tekanan pada stok ikan liar dan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Penelitian dan pengembangan juga memainkan peran krusial dalam pengelolaan perikanan Indonesia. Lembaga-lembaga penelitian pemerintah dan universitas melakukan studi tentang stok ikan, dampak perubahan iklim terhadap perikanan, dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang lebih berkelanjutan. Indonesia aktif dalam kerja sama internasional untuk pengelolaan perikanan. Negara ini adalah anggota dari berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) dan telah meratifikasi perjanjian internasional penting seperti UNCLOS dan UN *Fish Stocks Agreement*. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam upaya global untuk mengelola sumber daya perikanan secara berkelanjutan.

Perlindungan hukum sumberdaya perikanan di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan sektor perikanan negara. Landasan utama perlindungan hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum komprehensif untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan konservasi sumberdaya perikanan di Indonesia. Salah satu aspek penting dalam perlindungan hukum sumberdaya perikanan adalah pengaturan izin penangkapan ikan. Undang-undang mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia untuk memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Hal ini bertujuan untuk mengontrol aktivitas penangkapan ikan dan mencegah eksploitasi berlebihan.

Perlindungan hukum juga mencakup larangan penggunaan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau (trawl) dan bahan peledak. Undang-undang mengatur sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk hukuman penjara dan denda. Ini merupakan upaya untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan keberlanjutan stok ikan. Dalam rangka memerangi *Illegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing, Indonesia telah memperkuat kerangka hukumnya. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan wewenang kepada penegak hukum untuk menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Tindakan ini telah menjadi kebijakan yang kontroversial namun efektif dalam mengurangi IUU Fishing.

Perlindungan hukum juga diberikan kepada nelayan kecil dan pembudidaya ikan skala kecil. Undang-undang memberikan pengecualian izin bagi nelayan kecil yang menangkap ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemerintah diwajibkan untuk memberdayakan nelayan kecil melalui berbagai program seperti penyediaan sarana dan prasarana, jaminan sosial, dan akses ke pasar. Aspek penting lainnya adalah perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan berkelanjutan wilayah pesisir, termasuk perlindungan ekosistem yang mendukung sumberdaya perikanan.

Perlindungan hukum juga mencakup upaya konservasi melalui pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan memberikan dasar hukum untuk pembentukan dan pengelolaan KKP. Kawasan ini berfungsi untuk melindungi habitat penting, memulihkan stok ikan, dan mendukung perikanan berkelanjutan. Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya perikanan. Ini termasuk United Nations *Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *UN Fish Stocks Agreement*. Ratifikasi ini memperkuat komitmen Indonesia dalam perlindungan sumberdaya perikanan di tingkat internasional dan memberikan landasan hukum untuk kerja sama regional dan global.

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam perlindungan sumberdaya perikanan. Undang-undang memberikan wewenang kepada Pengawas Perikanan untuk melakukan pengawasan dan penyidikan terhadap pelanggaran di bidang perikanan. Selain itu, dibentuk pengadilan perikanan khusus untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum perikanan. Terakhir, perlindungan hukum sumberdaya perikanan di Indonesia juga mencakup aspek penelitian dan pengembangan. Undang-undang mewajibkan pemerintah untuk melakukan penelitian dan pengembangan perikanan untuk mendukung kebijakan pengelolaan perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang diterapkan sesuai dengan kondisi aktual sumberdaya perikanan.

## Tinjauan Umum Tentang *Ilegal Fishing*

### Definisi Ilegal Fishing

*Ilegal fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang perikanan yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Secara umum, ilegal fishing dapat didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di wilayah perairan suatu negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, definisi ilegal fishing dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meskipun istilah "*ilegal fishing*" tidak disebutkan secara eksplisit, undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori penangkapan ikan ilegal.

Pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 mendefinisikan penangkapan ikan sebagai kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Berdasarkan definisi tersebut, ilegal fishing dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Hal ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran, seperti penangkapan ikan tanpa izin, penggunaan alat tangkap yang dilarang, penangkapan di wilayah yang tidak sesuai dengan izin, dan pelanggaran kuota tangkapan.

Lebih lanjut, Pasal 8 Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 melarang setiap orang untuk melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini juga termasuk dalam kategori ilegal fishing.

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Penangkapan ikan tanpa SIUP yang sah juga dianggap sebagai tindakan ilegal fishing.

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Penangkapan ikan tanpa SIPI yang sah juga termasuk dalam kategori ilegal fishing.

Pasal 28 ayat (1) juga mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan). Pengangkutan ikan hasil tangkapan tanpa SIKPI yang sah juga dapat dikategorikan sebagai tindakan *ilegal fishing*.

Dengan demikian, menurut hukum positif di Indonesia*, ilegal fishing* dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan peraturan pelaksanaannya. Ini mencakup penangkapan ikan tanpa izin yang sah, penggunaan alat atau metode yang dilarang, pelanggaran wilayah penangkapan, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya yang dapat merugikan sumber daya perikanan dan lingkungan laut Indonesia.

### Pengaturan Mengenai *Ilegal Fishing*

Pengaturan ilegal fishing dalam hukum internasional didasarkan pada berbagai konvensi dan perjanjian multilateral. Salah satu instrumen utama adalah *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982. UNCLOS memberikan kerangka hukum umum untuk pengelolaan sumber daya laut, termasuk ketentuan tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) di mana negara pantai memiliki hak berdaulat atas sumber daya perikanan. Konvensi ini menjadi dasar bagi negara-negara untuk mengatur dan melindungi perairan mereka dari praktik penangkapan ikan ilegal.F

*Food and Agriculture Organization* (FAO) PBB telah mengembangkan International *Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (IPOA-IUU) pada tahun 2001. IPOA-IUU menyediakan serangkaian langkah komprehensif yang dapat diambil negara-negara untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Meskipun bersifat sukarela, dokumen ini menjadi acuan penting dalam pengembangan kebijakan nasional dan regional untuk memerangi *ilegal fishing*.

Di tingkat regional, berbagai organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs) telah dibentuk untuk mengelola stok ikan di wilayah tertentu. RFMOs seperti *Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna* (CCSBT) dan *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) memiliki aturan dan mekanisme tersendiri untuk mencegah, menangkal, dan mengeliminasi ilegal fishing di wilayah yurisdiksi mereka. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan utama mengenai ilegal fishing terdapat dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini memberikan definisi hukum tentang berbagai aspek kegiatan perikanan dan menetapkan sanksi bagi pelanggar, termasuk pelaku ilegal fishing.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 mengatur tentang perizinan dalam usaha perikanan. Pasal 26 sampai Pasal 28 mewajibkan setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan untuk memiliki izin, seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Penangkapan ikan tanpa izin-izin ini dianggap sebagai tindakan ilegal.

Undang-undang tersebut juga melarang penggunaan alat tangkap yang merusak. Pasal 8 melarang penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat, cara, atau bangunan yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi pidana yang berat. Untuk memperkuat penegakan hukum, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Pasal 73 mengatur tentang kewenangan penyidik, termasuk pemeriksaan kapal, penangkapan pelaku, dan penyitaan barang bukti. Selain UU Perikanan, Indonesia juga memiliki Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang mengatur lebih rinci tentang penangkapan ikan. Misalnya, Permen KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang mengatur zona-zona penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang diizinkan.

Untuk menangani kasus-kasus ilegal fishing yang melibatkan kapal asing, Indonesia telah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal. Kebijakan ini didasarkan pada Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada penyidik dan/atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing dengan bukti permulaan yang cukup. Dalam implementasinya, Indonesia juga telah membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas ilegal fishing. Satuan Tugas 115, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, merupakan upaya koordinatif antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan ilegal fishing di perairan Indonesia.

### Rumusan Tindak Pidana *Ilegal Fishing*

Rumusan tindak pidana ilegal fishing di Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Meskipun istilah "ilegal fishing" tidak disebutkan secara eksplisit, undang-undang ini menguraikan berbagai bentuk tindakan yang termasuk dalam kategori penangkapan ikan ilegal dan sanksi pidananya. Salah satu bentuk tindak pidana ilegal fishing adalah penangkapan ikan tanpa izin. Pasal 26 UU No. 45 Tahun 2009 mewajibkan setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar untuk kapal berukuran di bawah 30 GT, sebagaimana diatur dalam Pasal 92.

Tindak pidana lainnya adalah pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan). Pasal 27 mengatur kewajiban memiliki SIPI bagi setiap kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia atau laut lepas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar untuk kapal berukuran di bawah 30 GT, sesuai Pasal 93.

Penggunaan alat penangkapan ikan yang dilarang juga termasuk dalam rumusan tindak pidana ilegal fishing. Pasal 85 mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

Tindak pidana *ilegal fishing* juga mencakup penggunaan bahan atau metode yang merusak. Pasal 84 mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp1,2 miliar bagi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pemalsuan dan/atau penggunaan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu juga dirumuskan sebagai tindak pidana. Pasal 94A mengancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar bagi setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu. Tindak pidana *ilegal fishing* juga meliputi pelanggaran terhadap wilayah penangkapan ikan. Pasal 93 ayat (3) mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp20 miliar bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau di laut lepas, yang tidak membawa SIPI asli.

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga merumuskan tindak pidana terkait pengangkutan ikan. Pasal 94 mengancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar bagi setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIKPI. Selain itu, undang-undang ini juga merumuskan tindak pidana terkait dengan pemodifikasian kapal perikanan. Pasal 95 mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta bagi setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu.

Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga merumuskan tindak pidana bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar. Pasal 98 mengancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp200 juta bagi nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3).

### Kasus Hukum Ilegal Fishing

Salah satu kasus *ilegal fishing* internasional yang paling terkenal adalah kasus "*Thunder*" pada tahun 2015. Thunder adalah kapal penangkap ikan ilegal yang beroperasi di Samudra Selatan selama lebih dari satu dekade. Kapal ini dikejar oleh organisasi konservasi laut *Sea Shepherd* selama 110 hari, menjadikannya pengejaran laut terpanjang dalam sejarah. Akhirnya, Thunder ditenggelamkan oleh awaknya sendiri di lepas pantai Gabon untuk menghindari penangkapan. Di Indonesia, kasus F/V Viking pada tahun 2016 menjadi sorotan internasional. F/V Viking adalah kapal penangkap ikan ilegal yang telah lama dicari dan masuk dalam daftar hitam Interpol. Kapal ini akhirnya ditangkap oleh otoritas Indonesia di perairan Tanjung Berakit, Kepulauan Riau. Penenggelaman F/V Viking oleh pemerintah Indonesia menjadi simbol perjuangan melawan ilegal fishing dan mendapat perhatian media global.

Kasus "Bandit 6" juga menjadi viral di tingkat internasional. "Bandit 6" adalah enam kapal penangkap ikan ilegal yang beroperasi di Samudra Selatan, termasuk Thunder. Operasi penangkapan terhadap kapal-kapal ini melibatkan kerjasama internasional yang luas dan berlangsung selama bertahun-tahun. Penangkapan dan penenggelaman kapal-kapal ini dianggap sebagai kemenangan besar dalam perjuangan melawan *ilegal fishing*. Di Indonesia, kasus penangkapan kapal Hai Fa pada tahun 2015 menjadi viral karena besarnya skala operasi ilegal yang dilakukan. Kapal berbendera Panama ini tertangkap membawa lebih dari 900 ton ikan, termasuk spesies yang dilindungi, tanpa izin yang sah. Kasus ini menunjukkan kompleksitas masalah ilegal fishing yang melibatkan kapal-kapal besar dengan bendera negara lain.

Kasus MV Nika pada tahun 2018 juga menarik perhatian publik Indonesia. Kapal berbendera Panama ini tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Arafura. Yang membuat kasus ini viral adalah temuan 26 awak kapal berkebangsaan Indonesia yang dipekerjakan secara ilegal dan dalam kondisi memprihatinkan, menggambarkan masalah perdagangan manusia yang sering menyertai praktik *ilegal fishing*. Di tingkat internasional, kasus "Viarsa 1" pada tahun 2003 menjadi sorotan. Kapal penangkap ikan ilegal ini dikejar oleh otoritas Australia selama 21 hari melintasi Samudra Selatan, dalam pengejaran terpanjang dalam sejarah penegakan hukum maritim Australia saat itu. Kasus ini menunjukkan tantangan dalam mengejar dan menangkap kapal ilegal di perairan internasional.

Kembali ke Indonesia, kasus penenggelaman 51 kapal asing ilegal secara serentak pada tahun 2017 menjadi viral dan mendapat perhatian internasional. Aksi ini, yang dilakukan di berbagai lokasi di Indonesia, dianggap sebagai demonstrasi kuat dari kebijakan tegas Indonesia dalam memberantas *ilegal fishing*. Kasus penangkapan kapal Lu Huang Yuan Yu 117 pada April 2020 juga menjadi viral di Indonesia. Kapal berbendera Tiongkok ini tertangkap melakukan penangkapan ikan ilegal di Laut Natuna Utara. Yang membuat kasus ini menarik perhatian adalah penemuan 20 jenazah ABK Indonesia di freezer kapal, menunjukkan kondisi kerja yang mengerikan di kapal-kapal penangkap ikan ilegal.

Di tingkat internasional, kasus "STS-50" pada tahun 2018 menjadi perhatian. Kapal ini, yang dikenal dengan berbagai nama dan bendera, berhasil lolos dari otoritas beberapa negara sebelum akhirnya ditangkap di Indonesia. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dalam mengejar kapal-kapal ilegal yang sering berganti identitas. Terakhir, kasus terbaru yang viral di Indonesia adalah penangkapan dua kapal ikan asing ilegal di perairan Natuna pada Februari 2024. Kasus ini menarik perhatian karena terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan, dan menunjukkan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya.

## Tinjauan Umum Tentang Penegekan Hukum

### Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum secara umum dapat didefinisikan sebagai proses atau upaya untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang abstrak menjadi kenyataan. Ini melibatkan penerapan norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Dalam konteks yang lebih luas, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dijalankan sebagaimana mestinya. Ini mencakup tindakan preventif (pencegahan) dan represif (penindakan) terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Penegakan hukum juga dapat didefinisikan sebagai rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata.

Dari perspektif sistem, penegakan hukum dapat dipahami sebagai proses bekerjanya aparatur penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum. Ini melibatkan berbagai institusi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan hukum juga dapat didefinisikan sebagai usaha untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Dalam konteks yang lebih spesifik, penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi antara hukum dan perilaku nyata manusia. Dalam hal ini, penegakan hukum tidak hanya tentang menerapkan aturan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Terakhir, penegakan hukum dapat didefinisikan sebagai upaya untuk membawa ketentuan yang abstrak dalam peraturan hukum yang tertulis pada peristiwa konkret. Ini melibatkan proses penerjemahan dan penerapan norma-norma hukum terhadap kasus-kasus nyata yang terjadi dalam masyarakat.

### Penegakan Tindak Pidana Di Indonesia

Penegakan tindak pidana di Indonesia didasarkan pada sistem hukum pidana yang berlaku, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses ini melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan.

Tahap awal penegakan tindak pidana adalah penyelidikan, yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap ini, penyidik mengumpulkan bukti-bukti awal untuk menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Jika ditemukan bukti yang cukup, proses berlanjut ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahap pengumpulan bukti secara lebih mendalam. Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Hasil penyidikan kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang akan diserahkan kepada kejaksaan. Tahap selanjutnya adalah penuntutan, yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa akan mempelajari berkas perkara dari penyidik dan menentukan apakah berkas tersebut sudah lengkap. Jika sudah lengkap, jaksa akan membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

Persidangan di pengadilan merupakan tahap krusial dalam penegakan tindak pidana. Di sini, hakim akan memeriksa bukti-bukti dan keterangan saksi untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Proses ini didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu. Dalam penegakan tindak pidana, Indonesia menganut sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini melibatkan koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Selain KUHP dan KUHAP, penegakan tindak pidana di Indonesia juga diatur dalam berbagai undang-undang khusus. Misalnya, untuk kasus korupsi ada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, untuk kasus narkotika ada Undang-Undang Narkotika, dan sebagainya. Undang-undang khusus ini sering memiliki ketentuan yang berbeda dari KUHP dan KUHAP. Penegakan tindak pidana di Indonesia juga mengenal konsep diversi, terutama dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif.

Dalam perkembangannya, Indonesia juga telah mengadopsi beberapa pendekatan baru dalam penegakan tindak pidana. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan (e-court), penerapan keadilan restoratif untuk kasus-kasus tertentu, dan penguatan peran whistle-blower dalam pengungkapan tindak pidana. Meskipun demikian, penegakan tindak pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Isu-isu seperti lamanya proses peradilan, overcrowding di lembaga pemasyarakatan, dan masih adanya praktik korupsi dalam sistem peradilan menjadi perhatian dalam upaya perbaikan sistem penegakan hukum pidana di Indonesia.

### Jenis Jenis Penegakan Hukum

Penegakan Hukum Pidana: Jenis ini berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Prosesnya melibatkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan pidana. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Penegakan Hukum Perdata: Fokus pada penyelesaian sengketa antara pihak-pihak privat. Ini melibatkan gugatan perdata di pengadilan untuk menyelesaikan konflik terkait hak dan kewajiban antara individu atau badan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan.

Penegakan Hukum Administrasi: Berkaitan dengan penerapan sanksi administratif oleh pejabat atau lembaga pemerintah terhadap pelanggaran hukum administrasi. Contohnya termasuk pencabutan izin usaha, denda administratif, atau pembekuan kegiatan. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi negara.

Penegakan Hukum Preventif: Jenis ini berfokus pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Ini melibatkan tindakan-tindakan seperti penyuluhan hukum, patroli keamanan, dan pengawasan reguler. Tujuannya adalah untuk menciptakan kondisi yang mendukung kepatuhan hukum dalam masyarakat.

Penegakan Hukum Represif: Merupakan tindakan yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hukum. Ini melibatkan penindakan terhadap pelaku pelanggaran, seperti penangkapan, penahanan, dan penjatuhan hukuman. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan efek jera.

Penegakan Hukum Formal: Berfokus pada penerapan hukum sesuai dengan prosedur dan formalitas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ini menekankan pada aspek kepastian hukum dan keadilan prosedural.

Penegakan Hukum Substansial: Lebih menekankan pada pencapaian keadilan substantif atau keadilan yang sesungguhnya, terkadang dengan mengesampingkan formalitas hukum yang kaku. Ini bertujuan untuk mencapai keadilan yang lebih mendalam dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan Hukum Internasional: Melibatkan penerapan hukum internasional dan perjanjian antar negara. Ini dapat mencakup kasus-kasus yang ditangani oleh pengadilan internasional, seperti International Criminal Court (ICC) atau International Court of Justice (ICJ).

Penegakan Hukum Lingkungan: Berfokus pada penerapan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan tindakan terhadap pelanggaran seperti pencemaran lingkungan, penebangan liar, atau perdagangan satwa liar ilegal.

Penegakan Hukum Adat: Berkaitan dengan penerapan hukum adat yang masih diakui dan berlaku di beberapa daerah di Indonesia. Ini melibatkan penyelesaian sengketa atau pelanggaran berdasarkan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

### Lembaga Penegak Hukum Perikanan

Di tingkat internasional, *Food and Agriculture Organization* (FAO) dari PBB memainkan peran penting dalam penegakan hukum perikanan. FAO mengembangkan kebijakan dan panduan internasional untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan, termasuk *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Meskipun tidak memiliki kekuatan penegakan langsung, FAO berperan dalam menetapkan standar dan mendorong kerjasama internasional dalam penegakan hukum perikanan.

International Maritime Organization (IMO) juga berperan dalam penegakan hukum perikanan internasional, terutama terkait keselamatan kapal penangkap ikan dan pencegahan pencemaran laut. IMO mengembangkan konvensi internasional yang mempengaruhi operasi kapal penangkap ikan dan secara tidak langsung mendukung penegakan hukum perikanan. *Regional Fisheries Management Organizations* (RFMOs) adalah lembaga penting dalam penegakan hukum perikanan di tingkat regional. Contohnya termasuk *Western and Central Pacific Fisheries Commission* (WCPFC) dan *Indian Ocean Tuna Commission* (IOTC). RFMOs memiliki wewenang untuk menetapkan aturan pengelolaan perikanan di wilayah tertentu dan dapat menerapkan sanksi terhadap negara anggota yang melanggar aturan tersebut. Interpol, melalui *Project Scale*, juga terlibat dalam penegakan hukum perikanan internasional. Proyek ini berfokus pada penanggulangan kejahatan perikanan lintas batas, termasuk ilegal fishing. Interpol memfasilitasi pertukaran informasi dan kerjasama antar negara dalam penyelidikan dan penindakan kejahatan perikanan.

Di Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab atas penegakan hukum perikanan. KKP memiliki Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) juga memiliki peran penting dalam penegakan hukum perikanan di Indonesia. TNI AL melakukan patroli laut dan dapat menindak kapal-kapal yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia. Mereka bekerja sama dengan KKP dalam operasi pengawasan dan penindakan.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia adalah lembaga lain yang terlibat dalam penegakan hukum perikanan. Bakamla bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, termasuk mengawasi aktivitas penangkapan ikan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, juga berperan dalam penegakan hukum perikanan, terutama terkait dengan penanganan awak kapal asing yang terlibat dalam ilegal fishing. Mereka menangani aspek imigrasi dari kasus-kasus pelanggaran hukum perikanan yang melibatkan warga negara asing.

Kejaksaan Agung dan pengadilan di Indonesia juga merupakan bagian penting dari sistem penegakan hukum perikanan. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran hukum perikanan, sementara pengadilan memutuskan perkara-perkara terkait pelanggaran hukum perikanan.

Satuan Tugas 115, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015, merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk khusus untuk memberantas ilegal fishing di Indonesia. Satgas ini melibatkan koordinasi berbagai lembaga penegak hukum dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan ilegal fishing di perairan Indonesia.

## Tinjauan Umum Tentang Problematika Hukum Perikanan

*Ilegal, Unreported, and Unregulated* (IUU) Fishing: Salah satu masalah utama dalam hukum perikanan adalah maraknya praktik IUU Fishing. Ini mencakup penangkapan ikan tanpa izin, tidak melaporkan atau melaporkan data tangkapan yang tidak benar, serta penangkapan ikan di area yang dilarang atau dengan metode yang dilarang. IUU Fishing sulit diatasi karena luasnya wilayah perairan dan terbatasnya sumber daya untuk pengawasan. Yurisdiksi dan Penegakan Hukum di Laut Lepas: Perikanan di laut lepas menimbulkan tantangan hukum tersendiri karena berada di luar yurisdiksi nasional. Meskipun ada perjanjian internasional seperti UNCLOS, penegakan hukum di laut lepas tetap sulit karena keterbatasan otoritas negara dan kompleksitas kerjasama internasional.

Konflik Kepentingan Antar Negara: Sumber daya ikan yang berpindah-pindah (*straddling fish stocks*) dan ikan yang bermigrasi jauh (*highly migratory fish stocks*) sering menimbulkan konflik kepentingan antar negara. Pengelolaan bersama sumber daya ini memerlukan negosiasi dan kompromi yang tidak selalu mudah dicapai. *Overcapacity dan Overfishing*: Banyak negara menghadapi masalah kelebihan kapasitas armada penangkapan ikan dan *overfishing*. Ini menimbulkan tantangan hukum dalam hal bagaimana membatasi izin penangkapan ikan dan menerapkan kuota tangkapan yang efektif tanpa merugikan nelayan secara ekonomi.

Perlindungan Ekosistem Laut: Hukum perikanan harus menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan perlindungan ekosistem laut. Ini termasuk mengatur penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, menetapkan kawasan konservasi laut, dan menangani masalah *by-catch* (tangkapan sampingan) yang sering melibatkan spesies yang dilindungi. Keamanan dan Kesejahteraan Awak Kapal: Banyak kasus menunjukkan buruknya kondisi kerja dan pelanggaran hak asasi manusia di kapal penangkap ikan. Ini menimbulkan tantangan hukum dalam hal bagaimana mengatur dan mengawasi kondisi kerja di kapal, terutama di laut lepas.

Subsidi Perikanan: Subsidi perikanan oleh beberapa negara dianggap berkontribusi pada overfishing dan praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Namun, penghapusan subsidi ini menimbulkan tantangan hukum dan politik karena dampaknya terhadap industri perikanan domestik.Teknologi dan Pengawasan: Kemajuan teknologi seperti penggunaan drone dan satelit untuk pengawasan perikanan menimbulkan pertanyaan hukum baru terkait privasi dan yurisdiksi. Selain itu, penggunaan big data dalam pengelolaan perikanan juga memunculkan isu-isu hukum baru terkait kepemilikan dan penggunaan data.

Perubahan Iklim dan Hukum Perikanan: Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola migrasi ikan dan pergeseran habitat, yang berdampak pada pengelolaan perikanan. Ini menimbulkan tantangan dalam hal bagaimana hukum perikanan harus beradaptasi dengan perubahan kondisi lingkungan ini. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional: Banyak negara menghadapi kesulitan dalam menyelaraskan hukum perikanan nasional mereka dengan perjanjian internasional. Ini termasuk tantangan dalam mengimplementasikan standar internasional ke dalam hukum domestik dan memastikan konsistensi antara berbagai peraturan nasional yang terkait perikanan.